

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARO DALAM MENINGKATKAN  
WISATAWAN TANAH KARO PADA  
MASA PANDEMI *COVID19*  
(Studi Kasus di Bukit Gundaling)**

**SKRIPSI**

OLEH :

**SUSI FLORIDA BR SEBAYANG**

**178510014**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/22

**PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARO DALAM MENINGKATKAN  
WISATAWAN TANAH KARO PADA  
MASA PANDEMI *COVID19*  
(Studi Kasus di Bukit Gundaling)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan  
Politik Universitas Medan Area*

**OLEH:  
SUSI FLORIDA BR SEBAYANG  
178510014**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Karo  
Dalam Meningkatkan Wisatawan Tanah Karo Pada Masa  
Pandemi Covid19 (Studi Kasus Di Bukit Gundaling)

Nama : Susi Florida br Sebayang  
NPM : 178510014  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

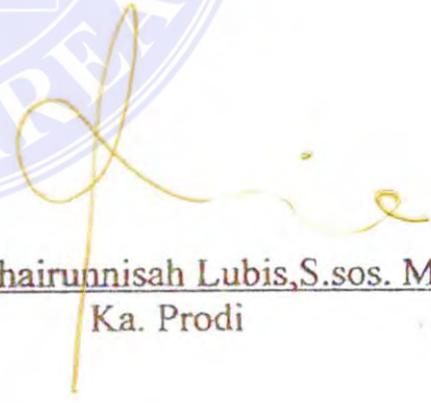
Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dr. Adam MAP  
Pembimbing I

  
Evy Yunita Kurniaty S.sos. M.IP  
Pembimbing II



  
Dr. Leniati Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Khairunnisah Lubis, S.sos. M.IP  
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 25 Oktober 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/22

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 25 Oktober 2021

Susi Florida br Sebayang  
178510014

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susi Florida br Sebayang  
NPM : 178510014  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan Wisatawan Tanah Karo pada masa Pandemi covid-19”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal: 25 Oktober 2021  
Yang Menyatakan



Susi Florida br Sebayang  
178510014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/22

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Kuala Pada tanggal 15 Januari 1998 dari ayah L Sebayang dan Alm ibu L Sembiring. Penulis merupakan putri Ke 4 dari 4 bersaudara. Tahun 2015 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tigabinangga dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

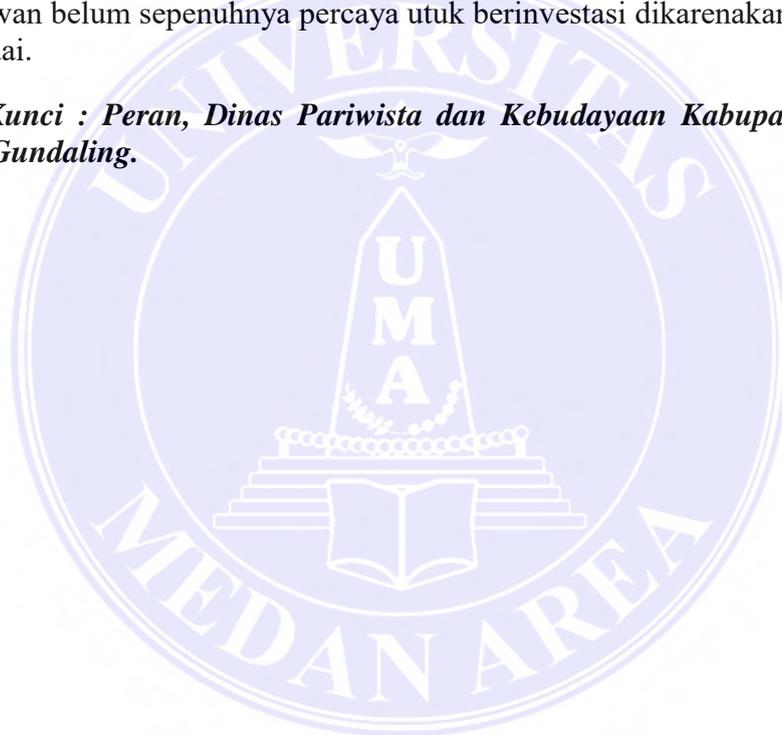
Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Samsat Medan Utara jalan Putri Hijau Medan Sumatra Utara



## ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini bahwa pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan jumlah wisatawan. Sosialisasi lokasi wisata bukit gundaling masih terbatas dan kekurangan dana untuk pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten karo dalam meningkatkan wisatawan serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Blakely, adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Berikut diuraikan hasil penelitian yaitu 1). Wirausaha, dinas pariwisata telah berperan melaksanakan kewirausahaan di lokasi wisata bukit gundaling. 2). Koordinator, telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik dikarenakan kurang kesadaran diri pada pelaku usaha dan masyarakat yang berkunjung. 3). Fasilitator, kurangnya anggaran dari dinas menyebabkan pembangunan tidak terlihat. 4). Stimulator, sudah dilakukan sosialisasi namun wisatawan belum sepenuhnya percaya untuk berinvestasi dikarenakan sarana belum memadai.

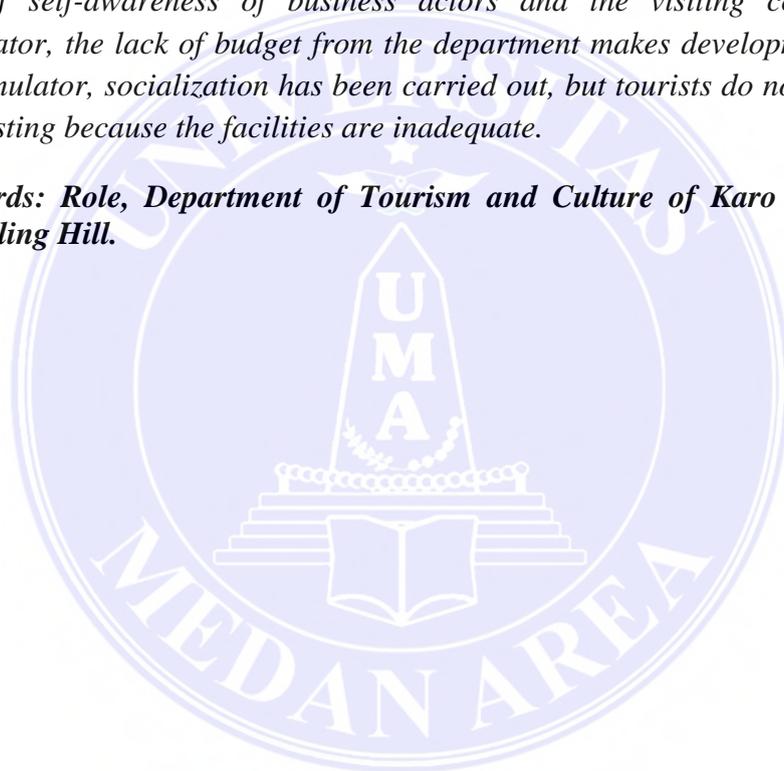
***Kata Kunci : Peran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dan Bukit Gundaling.***



## ABSTRACT

*The problem in this study is that during the Covid-19 pandemic there was a decrease in the number of tourists. The socialization of the Gundaling hill tourism location is still limited and there is a lack of funds for program implementation. This study aims to determine the role of the Karo regency tourism and culture office in increasing tourists and the obstacles faced. This study uses the role theory of Blakely, while the type of research used is qualitative research with observation data collection techniques, interviews, documentation. The following describes the results of the research, namely 1). Entrepreneurship, the tourism office has played a role in implementing entrepreneurship in Gundaling hill tourist sites. 2). Coordinator, has been implemented but has not gone well due to lack of self-awareness of business actors and the visiting community. 3). Facilitator, the lack of budget from the department makes development invisible. 4). Stimulator, socialization has been carried out, but tourists do not fully believe in investing because the facilities are inadequate.*

**Keywords:** *Role, Department of Tourism and Culture of Karo Regency and Gundaling Hill.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO DALAM MENINGKATKAN WISATAWAN TANAH KARO PADA MASA PANDEMI *COVID-19*”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda L. Sebayang dan Alm. Ibu L. Br Sembiring. Serta abang dan kakak yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan penuh kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Evy Yunita Kurniaty S.Sos.M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Guntur Khayangan Sitompul S.Sos, M.IP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf Tata Usaha yang banyak membantu penulis.
9. Kepada bapak Munarta Ginting SP selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo beserta jajaran, kepada Ibu Eva Angela S, SS, MM selaku Sekertaris, Bapak Bartholomeus Barus SIP selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran dan Ibu Ristanatalia br Sinaga, SE, ME selaku Koordinatr Bukit Gundaling, serta informan tambahan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Seluruh teman-teman stambuk 2017 prodi Ilmu Pemerintahan. Herli Tumanggor, Jefri Panjaitan, Irvan Marjuki, Vitrah Damayanti, Tamasiri Giawa, Paulus Situmorang, Safani Nada, Feri Afriadi, Novita Siregar, Muhammad Taufiq, Putra Nst yang telah memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima

pembelajaran dari pada Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.

11. Teman - teman seperjuangan skripsi Ruth R. Sianturi yang selalu saling berbagi pengetahuan dalam pengerjaan skripsi dan teman-teman yang selalu memberi semangat, membantu serta memotivasi dalam pengerjaan skripsi Jonathan Barus dan Novenna Sebayang, Terimakasih untuk kalian.

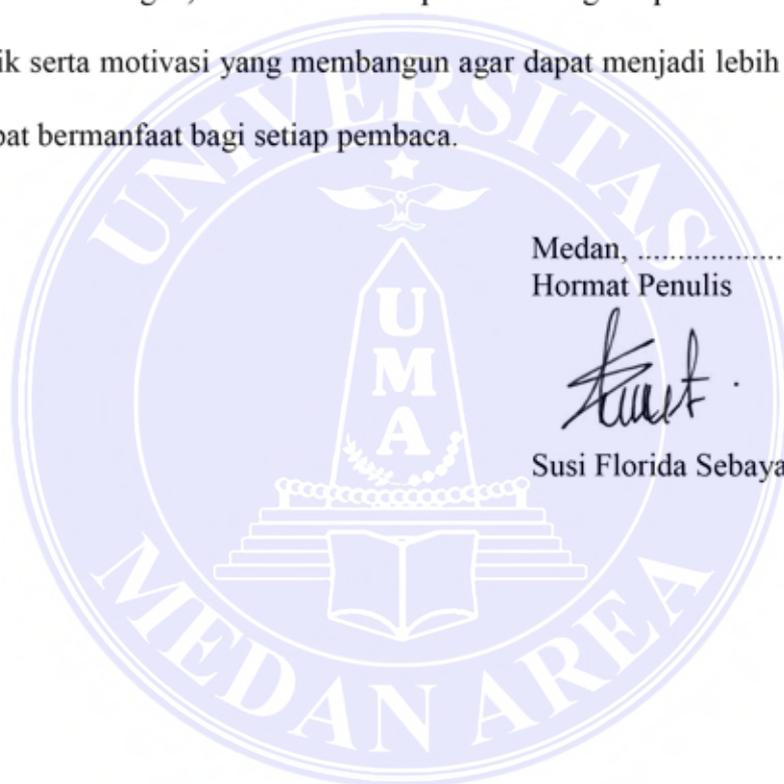
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, .....2022

Hormat Penulis



Susi Florida Sebayang



## DAFTAR ISI

### Halaman

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINILITASS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1 Peran .....	9
2.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	15
2.3 Pariwisata .....	16
2.4 Teori Kebijakan .....	19
2.5 Penelitian Terdahulu .....	24
2.6 Kerangka Berpikir .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	31
3.1.1 Jenis Penelitian .....	31
3.1.2 Sifat Peneliti .....	31
3.1.3 Lokasi Penelitian .....	32
3.2 Informan Penelitian .....	32
3.3 Teknik Pengambilan Data .....	34
3.4 Metode Analisa Data .....	36
BAB IV HASIL DAN PEBAHASAN .....	40
4.1 Hasil .....	40
4.1.1 Deskripsi Umum Dan Lokasi Penelitian .....	42
4.1.2 Visi Misi Dinas Pariwisata .....	44
4.1.3 Strutur Organisasi .....	45
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	45
4.2 Pembahasan .....	65
4.2.1 Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo .....	65
Kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	72

BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan .....	
5.2 Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kunjungan Wisatawan .....	5
Tabel 3.1. Jadwal dan Waktu Penelitian .....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	44



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor pariwisata merupakan sumber devisa yang cukup besar, dan juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintahan melakukan upaya-upaya dan membuat kebijakan atau peraturan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi covid19, dalam pemulihan pariwisata agar dapat menggali dan mengembangkan obyek-obyek yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting, dimana dalam perekonomian suatu negara, apabila dikembangkan secara terencana dan terpadu, peran pariwisata mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya seperti perhotelan, kerajinan lokal, industri makanan, serta transportasi. Dengan demikian lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara (penerimaan devisa) dapat meningkat. Sektor pariwisata dapat berfungsi sebagai peningkatan sekaligus akan mempercepat proses pembangunan daerah pariwisata tersebut.

Bentuk kekayaan lain yang dimiliki oleh Indonesia, terbentuk melalui kondisi masyarakat yang multicultural dengan adanya keberagaman etnik dan keanekaragaman budaya yang khas dari masing-masing kelompok masyarakat.

Undang-undang republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani serta intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan perekonomian masyarakat, jika keindahan alam ini dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pemasukan dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan terhadap daerah-daerah tersebut.

Kabupaten Karo adalah salah satu Kabupaten yang berada pada wilayah di Provinsi Sumatra Utara, kabupaten ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17° C. Salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Karo yaitu Bukit Gundaling. Bukit Gundaling merupakan objek wisata yang menawarkan keindahan alam, berupa panorama gunung sibayak dan gunung sinabung, wisatawan juga bisa melihat keseluruhan wilayah berastagi dari puncak Bukit Gundaling tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke Bukit Gundaling yaitu wisatawan domestik dan mancanegara. Keberadaan kunjungan wisatawan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah objek wisata daerah tersebut.

Keberadaan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan divisi kabupaten karu, khususnya pada Kecamatan Berastagi. Pemerintah Kabupaten Karo telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Karo No 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda (Peraturan Daerah) ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan menetapkan suatu pengembangan usaha pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari

sektor retribusi objek wisata dan pendapatan masyarakat umum, memperluas lapangan kerja dan kegiatan-kegiatan usaha pariwisata, memperkenalkan dan mendayagunakan potensi daerah dari sektor keindahan alam, kebudayaan daerah, hasil pertanian daerah dan hasil kerajinan daerah. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Karo.

Munculnya *covid19* telah membawa dampak yang buruk pada kehidupan manusia, seluruh aktivitas manusia berhenti. Dampak yang paling terasa yaitu pada sektor pariwisata, hampir seluruh aktivitas pariwisata berhenti seperti restoran dan perhotelan di Kabupaten Karo, salah satu sektor yang diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ditanya perihal ini ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Bapak Munarta Ginting mengungkapkan untuk PAD objek wisata yang berada di bawah naungannya sangat jauh berkurang. Dapat terlihat pendapatan daerah dari pariwisata berkurang, dilihat dari para pelaku usaha seperti perhotelan dan restoran membayar pajak 10% dari pendapatan asli setiap bulannya terlihat menurun. Jalan protokol kota Berastagi sepi, hampir tidak ada kendaraan yang parkir di sana. Sedangkan seperti hari biasa sebelum adanya pandemi *covid19* mobil wisatawan sudah memadati jalur utama di kota Berastagi.

Akibat dari Pandemi Covid19 yang berlangsung selama beberapa bulan ini menyebabkan melemahnya aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup

usahanya dan mengerumahkan karyawannya. Hal ini juga mendukung peraturan pemerintah untuk menerapkan *social distancing* ( pembatasan sosial).

Sebagai antisipasi atas merebaknya koronavirus yang bisa menjalar ke Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mencegah virus tersebut masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk 132 rumah sakit rujukan yang langsung berada di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) (sebelumnya hanya 100 rumah sakit) di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengikuti peraturan pemerintah pusat membentuk beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan, seperti Rumah Sakit Umum Pusat Adamalick Medan, RSU Bunda Thamrin Medan, RSU Efarina Etaham Kabupaten Karo.

Tabel 1.1  
Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo

Tahun	Domestik	Mancanegara	Jumlah
2019	478,951	6,066	485.017
2020	185,208	-	185,208

Sumber : Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Karo

Terlihat dari data kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis jumlah kunjungan wisatawan. Dikarenakan pandemi covid-19 masyarakat takut dan masih ragu-ragu untuk melakukan kunjungan wisata.

Setiap libur nasional maupun hari biasa lokasi wisata Bukit Gundaling selalu dikunjungi oleh wisatawan untuk berlibur. Namun, pada saat ketika pandemi *covid19* jumlah pengunjung yang datang sangat jauh berkurang, bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak ada. Terlebih, semenjak Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan status tanggap darurat *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo juga turut mengikuti hal tersebut. Dari status ini, Pemkab Karo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mengambil kebijakan untuk

menutup sementara objek-objek wisata yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.

Pada satu tahun terakhir akibat pandemi covid 19 Safry Gantang Perangin-angin selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah( BPKPAD) menyatakan pendapatan sangat berkurang dari yang sudah ditargetkan pada sektor pariwisata. Untuk PAD (Pendapatn Asli Daerah) juga terlihat dari pariwisata seperti penyediaan jasa hotel dan restoran. Masih belum mendapat angka pasti, namun PAD baik dari hotel dan restoran sangat menurun.

Selama okupansi (tingkat hunian kamar) hotel dan jumlah pengunjung restoran menurun, sudah pasti akan berpengaruh terhadap PAD setiap daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARO DALAM MENINGKATKAN WISATAWAN TANAH KARO PADA MASA PANDEMI COVID19”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, untuk mempermudah penelitian ini agar mendapat arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan latar belakang di

atas. Dengan adanya latar belakang masalah peneliti mengambil rumusan masalah pada peneliti ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi *covid19* khususnya Bukit Gundaling ?
2. Apakah yang menjadi kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan Tanah Karo pada masa pandemi *covid19* khususnya di Bukit Gundaling?

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal atau pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi *covid19* khususnya di Bukit Gundaling?
2. Untuk mengetahui kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan di Tanah Karo pada masa pandemi *covid19* khususnya di Bukit Gundaling?

## 1.3 Manfaat Penelitian

### A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dalam mengetahui bagaimana perkembangan tempat wisata di

kabupaten karo khususnya bukit gundaling dalam masa pandemi *Covid19*.

2. Sebagai bahan informasi bagaimana peran dan kendala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten karo dalam pemulihan pariwisata tanah karo khususnya di Bukit Gundaling.
3. Menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area dan sekaligus bisa menjadi pengembangan peneliti peneliti lainnya yang khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dengan sistematis dan metodologi bagi penulis dan mahasiswa lainnya.

#### B. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan Dinas Pariwisata Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan terhadap tempat wisata Kabupaten Karo.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan.
3. Sebagai landasan untuk membaca realita yang terjadi di tempat wisata kabupaten karo khususnya bukit gundaling.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto dan Sulistyowati (2017: 210-211) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Sedangkan Grass Mascan dan A.w.Mc.Eachern dikutip oleh Berry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan imbalan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan lainnya.

Kata peran adalah salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995: 571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti yaitu: setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kabupaten Karo dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu:

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi.

Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

- b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Davey (1998:21) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang

berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Menurut Oka A. Yoeti (2001: 187) ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu :

- a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusatpusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah

yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan.

Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebabkan adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Secara garis besar peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Berastagi mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (dinamisator).

Dari semua pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan peranan adalah perilaku seseorang yang di perhatikan atau diterapkan di lingkungan sekitarnya, ia memiliki tugas yang di terima dan dijalankannya. Peranan juga memiliki tanggungjawab yang harus di jaga dan diembannya agar tercapainya tujuan bersama dan tujuan pada pribadi sendiri.

Maksudnya jika peranan itu dilakukan untuk diri sendiri tentu ia memiliki tujuan tersendiri pula jika peranan itu dilakukan dalam organisasi maka tujuan yang akan dicapai adalah tujuan bersama. Peranan tentu memiliki batasan-batasan masing-masing yang dimaksud tugas dan pokok agar terstruktur dengan baik.

## **2.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berastagi memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Karo pada bidang pariwisata dan budaya berdasarkan asas otonomi daerahnya. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya, dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berastagi merupakan daerah otonom. Yang memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25. Dengan adanya tugas dan wewenang serta kewajiban dinas pariwisata dan kebudayaan dibutuhkan implementasi untuk mencapai tujuan bersama yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat dibutuhkan agar keseimbangan dalam pelaksanaan sesuai, serta tercapainya tujuan bersama.

### **2.3 Pariwisata**

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; konstruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai: Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Pariwisata adalah sebuah industri hiburan yang didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah. Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk

rekreasi, pelancongan, turisme. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang menyimpan banyak kekayaan sumber daya yang terbentang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Yoeti (1996:188), Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang dimaksud antaranya adalah:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ketempat lainnya.
- c. Perjalanan itu, walau apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen tempat tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas kita lebih cenderung untuk memberikan definisi pariwisata sebagai berikut: "Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam".

Tourism Society in Britain (dalam Pendit, 2006:33) di tahun 1976 merumuskan bahwa pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ketempat tempat tujuan di luar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat

tujuan tersebut mencakup kepergiaan untuk berbagai maksud, termasuk, kunjungan seharian atau darmawisata. layanan dan sebagainya Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009, keseluruhan lingkup kegiatan pariwisata tadi berkaitan batasan pengertian sebagai; Berbagai macam kegiatan dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah Secara lebih luas didalam Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, juga dijelaskan mengenai kepariwisataan, yang diberikan batasan pengertian atau definisi sebagai: keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatwan, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Nyoman (2003:14), wisatwan adalah “orang yang melakukan kegiatan wisata atau orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya”. Menurut Yoeti, jenis dan macam wisatawan, yaitu :

- a. Wisatawan asing
- b. Domestic foreign tourist
- c. Destic Tourist
- d. Indigeneous Tourist
- e. Transit Tourist
- f. Bussines Tourist

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa asal wisatawan yang melakukan wisata di Indonesia terdapat dua kelompok, yaitu wisatawan domestik (warga negara Indonesia) dan wisatawan asing (warga negara asing). Yang bertujuan berekreasi secara individu ataupun kelompok.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha ( Pasal 28 ) ditegaskan bahwa setiap wisatawan yang memasuki objek wisata di Kabupaten Karo dikenakan biaya retribusi untuk objek wisata alam dan wisata budaya sebesar Rp 5.000 untuk orang Dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak, tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di perda, tidak terdapatnya bukti seperti karcis atau tiket tanda masuk ke objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan menyebabkan sering terjadi pungutan liar yang merugikan wisatawan.

Dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyediaan sarana dan prasarana, perawatan, pembenahan dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## **2.4 Teori Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan

keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun.

Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para pemerintah dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.

Maka orientasi kebijakan yang dipinjam dari pendapat Harold Lasswell dapat diringkas sebagai orientasi yang :

- < Multi-method;
- < Multi-disciplinary;
- < Berfokus pada problem ( problem-focused);
- < Berkaitan dengan pemetaan kontekstualitas proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan;

- ◁ Bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh ( overarching) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Dan adapun pendapat Seperti yang dikatakan Trudi Miller, ilmu alam merepresentasikan pendekatan administrasi publik dan ilmu politik yang semakin berkembang ke abad ke 20, asumsi yang tersirat dari pendekatan ilmu alam ini adalah.

1. Ada hukum yang mengatur perilaku manusia yang bebas dari kontrol manusia, dan
2. Unit-unit analisa dalam sistem sosial sama di semua kurun waktu dan tempat. Metode ilmu sosial kualitatif lama merefleksikan asumsi empiris ini. (Miller, 1984:253).

Sedangkan Anderson dalam Suharto (2005:44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Selanjutnya Laswell dalam Wibowo (2004:20) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan

pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

Menurut Oka A. Yoeti (2001 : 48), organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya adalah :

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- c. mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif

keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat. Telahan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan jadi industry pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasran yang bertanggungjawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan akuntable.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo adalah Misi ke satu yaitu berkaitan dengan kebudayaan, misi kedua untuk urusan Kepariwisataan serta misi ketiga untuk urusan kebudayaan dan pariwisata yang diklaborasikan dalam program kegiatan dinas. Sementara keterkaitan misi yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo selain sebagai

salah satu daerah otonom yang berada dalam provinsi Sumatera Utara, tentunya untuk urusan Pariwisata dan Kebudayaan sangat berkaitan erat dengan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo adalah“ Terwujudnya masyarakat kabupaten karo yang maju, demokratis, beriman dan sejahtera dalam suasana kekerabatan karo” dan menyangkut dengan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Utara yaitu “ Melindungi dan melestarikan nilai budaya dan kekayaan budaya, mengembangkan pariwisata menjadi daerah tujuan wisata yang berdaya saing, meningkatkan profesionalisme SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata dan meningkatkan industri kepariwisataan.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian terdahulu terkait Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dalam meningkatkan wisatawan terhadap tempat wisata, adalah sebagai berikut :

Nita Bonita (2016) mengenai “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuhan Cermin di Kabupaten Berau” Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut disimpulkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengambil peran dengan memberikan pelatihan tentang bagaimana mengelola penginapan yang baik dan sesuai dengan standar pariwisata. Akomodasi yang dijalankan masyarakat adalah berupa homestay.

Faktor pendukungnya adalah Kabupaten Berau dikenal sebagai wisata Bahari termasuk Labuan Cermin dan adanya Bandara di Kabupaten Berau. Faktor Penghambatnya adalah akses jalan dari Ibukota ke kecamatan BidukBiduk masih rusak, masih langkanya pemandu wisata, tidak adanya petugas keamanan di kawasan wisata Labuan Cermin, serta kurangnya dana untuk menjalankan program seperti kegiatan promosi.

Perbedaan antar skripsi peneliti pada saat ini dengan skripsi Nita Bonita pada tahun 2016 adalah lokasi peneliti dan masalah yang dihadapi di setiap pariwisata dalam meningkatkan wisatawan, tujuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada peneliti terdahulu dengan peneliti pada saat ini sangat berbeda dikarenakan pada saat ini di masa pandemi covid19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengutamakan pemulihan pariwisata dengan mengikuti protokol kesehatan, sedangkan penelitian terdahulu hanya mengupayakan peningkatan dan pembangunan. Persamaannya adalah dalam Peran Dinas pariwisata dan Kebudayaan mengupayakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Penelitian terdahulu Santi Marselinda (2020) mengenai “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Melestarika Kesenian Nandong di Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Tengah” Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan peneliti Peran Disparbud dalam pelestarian kesenian Nandong pada tahun 2018-2019 dapat dikatakan masih adanya kekurangan karena dalam masalah pengembangan kesenian nandong belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan Disparbud harus mendapatkan izin dari bupati atau persetujuan dalam melaksanakan program yang telah dirancang, sehingga membuat

keterlambatan dalam melaksanakan kebijakan, serta sulitnya mendapat buku pedoman tentang nandong dan peralatan yang terbatas.

Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu terlihat jelas, bawasanya skripsi Santi Marselinda meneliti mengenai peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melestarikan kesenian nandong sedangkan skripsi peneliti menjelaskan bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam peningkatan wisatawan.

Penelitian mengetahui strategi Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam meningkatkan wisatawan Bukit Gundaling oleh Junaidi Sembiring(2018). Dalam penelitian tersebut yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemasaran oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo. Informan terdiri dari para pengunjung lokasi penelitian, para pelaku wisata, organisasi wisata dan Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan strategi komunikasi pemasaran yang dirancang oleh internal tanpa melibatkan para pelaku wisata dalam perencanaan. Dalam pemasaran objek wisata Gundaling dilakukan komunikasi pemasaran terpadu (IMC) melalui advertising, public relations, sales promotion dan personal selling. Strategi komunikasi pemasaran antara lain berfokus pada: image, daya tarik alam, dukungan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi. Strategi komunikasi pemasaran yang menonjolkan keunikan Karo yaitu seni budaya dan daya tarik alam untuk memenangkan persaingan dengan daerah lain.

Persamaannya adalah meneliti mengenai tempat wisata Bukit Gundaling. Hanya yang membedakannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada implementasi dan pemasaran atau komunikasi antara tempat wisata. Dan Perbedaannya peneliti terdahulu mengenai pengembangan objek wisata sedangkan skripsi peneliti pada saat ini mengenai peningkatan wisatawan dalam pemulihan pariwisata pada masa pandemi covid19. Persamaannya adalah sama sama meneliti bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pariwisata.

Rano rasid (2018). Mengenai “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pengembangan Obyek Wisata” Dilihat dari pengembangan atraksi wisata, atraksi wisata merupakan kegiatan seremonial, tanpa adanya konsep yang jelas dan terobosan-terobosan baru. Dinas Pariwisata perlu melaksanakan kegiatan promosi wisata, dengan melakukan upaya promosi produk wisata dan penyelenggaraan event internasional. Dinas Pariwisata telah berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat lokal, melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok industri rumahan dalam pembuatan barang souvenir dan oleh-oleh.

Yeti Yudiyanti dan Sugi Rahayu M.Pd, M.Si. peneliti terdahulu mengenai “Peran Dinas Pariwisata dan Kbudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Commnity Based Tourist)” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan, Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) secara umum belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber

daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga.

Kondisi masyarakat Yogyakarta yang majemuk dan terdiri dari masyarakat pendatang dengan beragam kompleksitas yang dimilikinya. Peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat lebih dominan sebagai fasilitator dalam bentuk fisik. Sedangkan untuk non fisik kegiatan lebih terfokus pada sektor swasta, sehingga tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara kemitraan yang dilakukan dengan swasta dan masyarakat. Untuk peran sebagai implementor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya menjalankan mandat maupun instruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum terlihat inovasi yang berarti bagi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism). Peran motivator masih minim dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan lebih dominan dilakukan terhadap pihak swasta sedangkan kepada masyarakat dilakukan secara insidental, begitu pula untuk peran dinamisator Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta lebih banyak melakukan upaya dinamisasi terhadap pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bidang pariwisata melalui usaha jasa pariwisata.

Perbedaannya terdapat pada teori dan masalah yang diteliti dan persamaannya terdapat pada bagaimana peran Dinas pariwisata dalam mensosialisasikan pariwisata agar dapat meningkatkan pariwisata pada daerah wisata tersebut

## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan.

Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peran dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten karo dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi covid19 di bukit gundaling. Bukit gundaling tersebut merupakan tempat wisata yang ramai pengunjung dikarenakan tempat tersebut wisatawan dapat menikmati indahnya kota berastagi, gunung sibayak dan gunung sinabung, tetapi pada masa pandemi *covid-19* mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk meningkatkan wisatawan pada masa pandemi *covid19* ini. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi dinas, agar penelitian ini mendapat jawaban dari rumusan masalah yang dibuat. Adapun kendala yang terdapat dalam penelitian ini terbatasnya sosialisasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat secara luas dengan mengakibatkan kurangnya kepercayaan wisatawan terhadap tempat wisata Bukit Gundaling dan belum memadai anggaran untuk menjalankan program peningkatan wisatawan tersebut.

Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori peranan dari (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

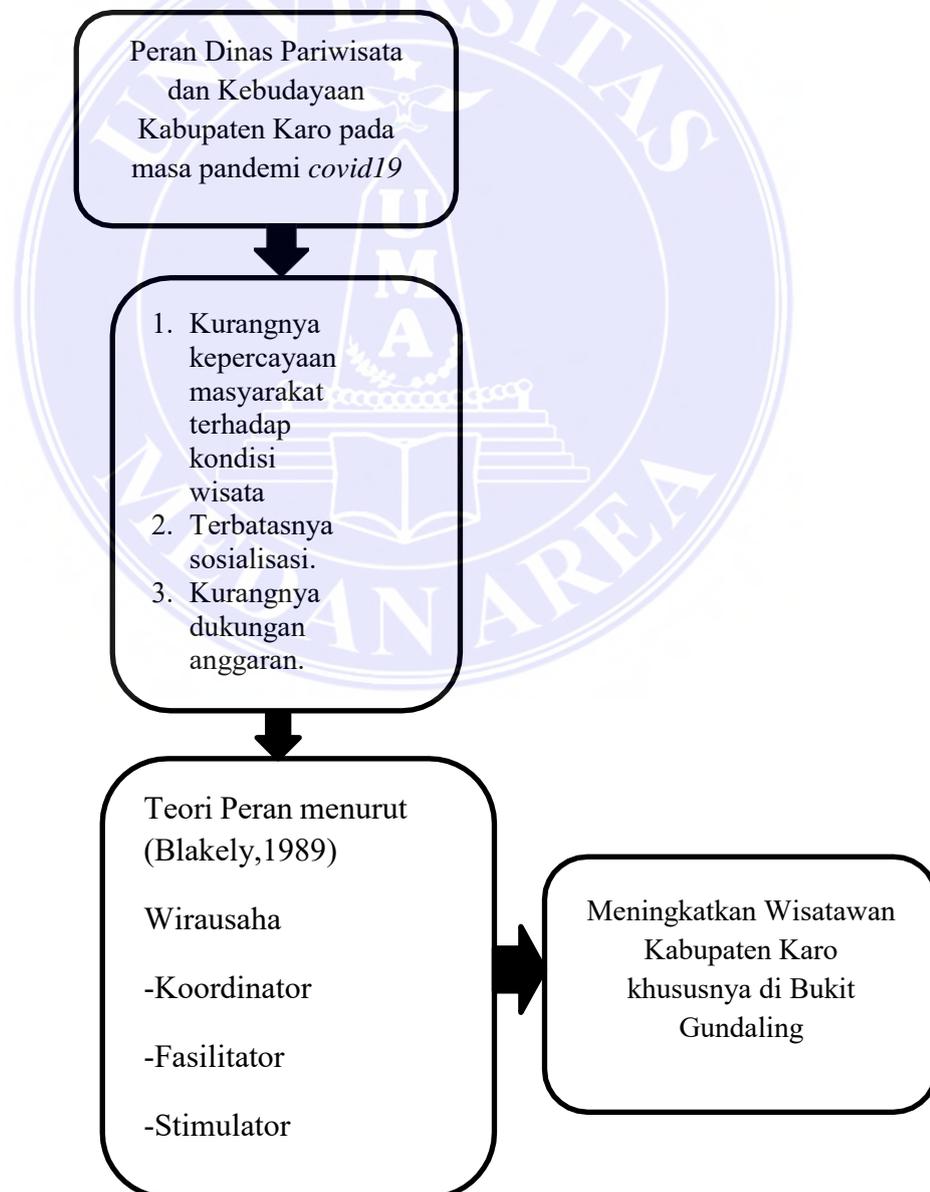
a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Lokasi Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di Bukit Gundaling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, data dianalisis secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan akan di paparkan sesuai dengan kerangka pemikiran yang berlaku umum. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah.

#### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat pada penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Untuk dapat memecahkan masalah-masalah terjadi di lapangan. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti juga menggambarkan dan menganalisis terutama pada peran Disparbud dan masyarakat lokal dalam meningkatkan wisatawan pada tempat wisata di Kabupaten Karo sehingga mendapat kesimpulan penelitian.

### 3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, yang beralamat di jalan Gundaling No 1, , Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kode pos 22152, Provinsi Sumatera Utara. Telp. (0628) 91558.

Tabel 3.1  
Jadwal dan waktu penelitian

No	Kegiatan	2020			2021		
		Okt-Nov	Jan	Feb-April	Mei	Sep	Okt
1	Penyusunan dan bimbingan proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Pengambilan Data Survei			■			
4	Pengumpulan Data			■			
5	Seminar Hasil				■		
6	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi				■		
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau					■	
8	Sidang Meja Hijau						■

### 3.2 Informan Penelitian

Informan menurut Arikunto (2013: 130) adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, di karenakan

penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu ada gejala dan cara untuk mengatasinya. Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah peningkatan wisatawan Kabupaten Karo khususnya Bukit Gundaling dan pengaruh wisatawan pada saat pandemi covid19 terhadap Bukit Gundaling Kabupaten Karo. Peningkatan wisatawan Kabupaten Karo khususnya Bukit Gundaling dan pengaruh wisatawan pada saat pandemi covid19 terhadap bukit gundaling merupakan tolak ukur keberhasilan dari kebijakan pemerintah, oleh karena itu peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten karo penting menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi tambahan terkadang memebrikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama dan informan kunci.

1. Informan Kunci pada Penelitian ini adalah Bapak Munarta Ginting, SP selaku sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo.

2. Informan Utama ibu Eva Angela S,SS,MM selaku sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo serta Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dibagian Kabid Pengembangan Pemasaran dengan bapak Baerholomeus Barus, SIP
3. Informan Pendukung bapak hidayat sebagai manager hotel Sinabung hills berastagi, bapak karma surbakti sebagai pelaku usaha di bukit gundaling dan bapak viktor sembiring sebagai wisatawan.

### 3.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan suatu data dan informasi untuk melengkapi suatu penelitian, metode penelitian ini bisa dibedakan dalam spesifik dalam memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data primer, yang dimana informasi yang diperoleh dari sumber-sumber bersifat primer, data yang didapatkan berupa hasil observasi di lapangan serta wawancara yang dilakukan terhadap informan.

Data tersebut adalah informasi tentang Bukit Gundaling yang di dapat dari Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karo dan data sekunder, yang mana informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden melainkan data dari literatur atau buku perpustakaan, juga website

yang memiliki informasi terkait daya tarik wisata Bukit Gundaling. Adapun teknik pengambilan data sebagai berikut:

- a. Dalam memasuki lokasi penelitian, hal ini peneliti harus mampu beradaptasi di lokasi penelitian. Kemampuan tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.
- b. Etika berada di lokasi peneliti, dalam hal ini peneliti harus memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lokasi penelitian.
- c. Mengumpulkan data adalah hal terpenting dalam melakukan penelitian, karena penelitian harus mengumpulkan data data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu:

- a. Wawancara adalah suatu pencarian atau pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pewawancara) untuk mengumpulkan data dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- b. Observasi secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra pengelihat yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam menggunakan observasi, cara yang

paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pendaftar sebagai instrumen.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, bisa dengan variabel yang berupa surat kabar, buku, dan catatan.

Dalam penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data dari dokumentasi, berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, halaman website, serta peraturan yang berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pengaruh di masa pandemi covid19 dalam peningkatan wisatawan.

### 3.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2014 :244)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012 :255) meliputi:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan adalah peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat dalam meningkatkan wisatawan dalam masa pandemi covid19.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan tujuan penelitian peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada tahun 2020 untuk mendapatkan pemecahan masalah.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi covid19 pada tahun 2020. penelitian tentu mendapatkan hasil dari penelitan tersebut.

#### d. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat lokal dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi *covid19* memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

e. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep secara jelas mengenai variable-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007;93). Kegiatan yang harus dilakukan disini adalah membuat konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variable agar dapat di ukur, berdasarkan kerangka konsep di atas, maka variable tersebut dapat dibatasi untuk membentuk kesesuaian dalam penelitian ini.

Kajian ini berkenaan dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Wisatawan pada masa pandemi Covid19. Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dalam kajian ini adalah segala suatu upaya dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan wisatawan yang membutuhkan peran sektor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya melakukan strategi dalam pemulihan pariwisata Adapun indikator dari Peran Dinas Paariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan Wisatawan pada masa pandemi covid19 itu adalah:

1. Pada Wirausaha ( entrepreneur), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis yang memanfaatkan tanah di

sekitaran daerah tersebut sebagai tujuan membuka peluang kerja bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar dan menambah pendapatan daerah.

2. Koordinator, pemerintah dapat bertindak untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-startegi bagi pembangunan di daerahnya.
3. Fasilitator, pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan prilaku di daerahnya.
4. Stimulator, pemerintah dapat menstimulasi dengan pembangunan usaha melalu tinndakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar pengusaha-pengusaha yang ada tetap berada didaerah tersebut.

. Suatu program dapat diukur dengan melihat hasil yang dicapai. Hal tersebut tentu saja tidak boleh menyimpang dari tujuan. Jika memang tujuan sudah tercapai dengan waktu, tepat pelaksanaan dan tepat kualitas, maka dari suatu program dapat dikatakan baik. Karena ketiga komponen tersebut di atas telah terpenuhi, maka dari itu telah teruji. Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator tujuan yang direncanakan dalam perencanaan dapat terwujud. Pelaksanaan dalam perencanaan dapat terealisasi dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tercapainya tujuan seperti yang telah ditetapkan.

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran dinas pariwisata kabupaten karo dalam meningkatkan wisatawan di masa pandemi covid19 sudah berjalan dengan baik namun belum memberikan hasil yang optimal.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi *covid19* yaitu, kepercayaan masyarakat terhadap kondisi tempat wisata Bukit Gundaling, sosialisasi belum menyeluruh atau terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dan terbatasnya anggaran yang bisa digunakan Dinas dalam mendukung berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan wisatawan di lokasi Bukit Gundaling.

### **5.2 Saran**

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo agar meningkatkan sarana dan fasilitas yang berada di objek wisata di kabupaten Karo sesuai dengan protokol kesehatan.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi tentang wisata Bukit Gundaling secara luas dengan menggunakan media dalam dan diluar ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Parsons, W. (2006). *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subjayadi, A. (2019). *Pariwisata Hindia- Belanda(1891-1942)*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Hartono, dkk. 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta. PT Bina Ilmu.
- Herdiansyah, H. 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, untuk ilmu ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marpaung, Happy dan Bahar, Herman. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, Oka A., dkk. 2006 *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poerwadarmita W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Aksara Baru.

### JURNAL

- Bonita, N. (2016). Peran Dinas Parawisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuhan Cermin Kabupaten Berau.
- Marselinda, S. (2020). Peran Dinas Parawisata dan kebudayaan dalam melestarikan kesenian Nandong di kabupaten Simalue kecamatan Simalue Tengah.
- Sembiring, J. (2018). Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Wisatawan Bukit Gundaling.
- Solid, R. (2018). Peran Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengembangkan Oyek Wisata.
- Yulianti, Y. (2017). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat ( Community Based Tourisme).

### UNDANG-UNDANG

- REPUBLIK, P. I. (2004). UNDANG UNDANG RPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004. In M. S. PUTRI, *Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah*. Jakarta.
- INDONESIA, P. R. (2009). UNDANG UNDANG REPUBLIK INDINESIA. In *TENTANG KEPARIWISATAAN*. JAKARTA.

### INTERNET

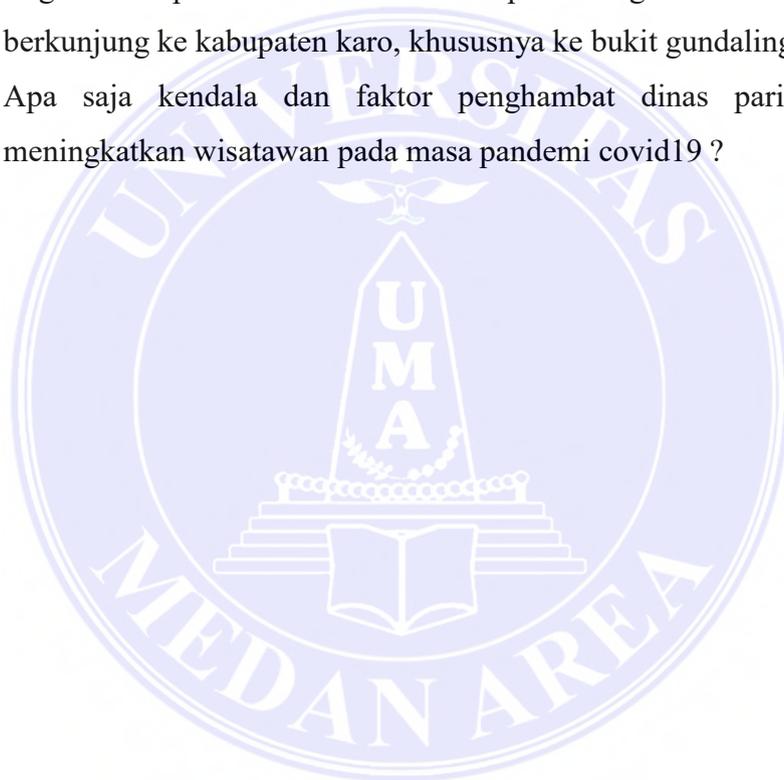
- Nasrul, M. (2020, April Minggu). *Dampak Corona, Dinas Pariwisata Kabupaten Karo Mendata penurunan PAD 50 persen*. Retrieved Desember 12, 2020, from Tribun Medan: <http://madan.tribunnews.com/2020/04/26/dampak-corona-dinas-pariwisata-kabupaten-karo-mendata-penurunan-pad-50-persen>

Mulyawan, A. (2020, Juni Minggu). Retrieved Desember 29, 2020, from kompas.com: [ttp://travel.kompas.com/read/2020/06/28/161137527/upaya-memulihkan-sektor-priwisata-indonesia-pascapandemi-covid19?page=1](http://travel.kompas.com/read/2020/06/28/161137527/upaya-memulihkan-sektor-priwisata-indonesia-pascapandemi-covid19?page=1)



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana dinas pariwisata berparen terhadap tempat wisata di kabupaten karo pada masa pandemi covid19 ?
2. Apa saja upaya dinas dalam mengatasi permasalahan pada masa pandemi covid19 ?
3. Bagaimana dinas melakukan pembangunan fasilitas terhadap tempat wisata di kabupaten karo khususnya di bukit gundaling pada masa pandemi covid19 ?
4. Bagaimana peran dinas untuk tetap meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten karo, khususnya ke bukit gundaling ?
5. Apa saja kendala dan faktor penghambat dinas pariwisata dalam meningkatkan wisatawan pada masa pandemi covid19 ?



## DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala dinas Bapak Munarta Ginting, SP dan sekretaris Eva Angela S,SS,MM



Gambar 2. Wawancara dengan Kabid Pengembangan Pemasaran yaitu bapak Bartholomeus Barus



Gambar 3. Wawancara Dengan Staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Gambar 4. Wawancara dengan Manager Hotel Sinabung Hiils yaitu bapak Hidayat



Gambar 5. Wawancara dengan Pelaku Usaha yaitu Karma Surbakti



Gambar 6. Wawancara dengan wisatawan yakni bapak Viktor Sembiring



Gambar 7. Lokasi Wisata Bukit Gundaling



Gambar 8. Lokasi Wisata Bukit Gundaling